

## BAB V

### PENUTUP

#### V.I Kesimpulan

Dalam perspektif *feminist security theory*, kebijakan Amerika Serikat dalam “*War on Terrorism*” terkonstruksi oleh diskursus maskulinitas. Hal ini terlihat yaitu dari adanya irrelevansi dan noneksistensi perempuan sebagai pembuat keputusan dalam kebijakan perang dan damai, dimana dalam pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu, proses pembuatan kebijakan mayoritas dirumuskan oleh laki-laki. Kebijakan ini diasosiasikan pula dengan karakter laki-laki dimana adanya rasionalitas yang tergambarkan dari kebijakan yang dicetuskan oleh presiden George Walker Bush, yaitu terlihat dari strategi kebijakan tersebut yang menggunakan prinsip *pre-emptive military strikes doctrine* yang merupakan penggunaan militer untuk mencegah serangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi warga negara yang lemah (perempuan dan anak-anak) yang dalam lensa feminis hal tersebut merupakan mitos perlindungan yang tercakup dalam karakter kebijakan maskulinitas, dimana perang itu sendiri justru mengakibatkan lebih banyaknya korban (terutama wanita dan anak-anak) yang seharusnya dilindungi tersebut.

Dilihat dari perspektif *feminist security theory*, hegemonik baru maskulinitas Amerika Serikat telah dikonfirmasi muncul dalam wacana tentang

militerisasi Perang Melawan Terorisme, yaitu pertama di Afghanistan, kemudian di Irak. Kebijakan “*War on Terrorism*” dengan menggunakan kekuatan militer dalam penyerangan ke negara lain yang dianggap berkaitan dengan aksi terorisme pada peristiwa 9/11 salah satunya ke Afghanistan dan Irak tersebut bertentangan dengan hukum internasional, dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dimana lebih banyaknya korban terutama kaum perempuan yang berjatuh dari adanya perang yang dilakukan untuk mencegah terorisme tersebut dibandingkan korban pada tragedi 9/11 di Amerika Serikat.

*Feminist security theory* menyimpulkan bahwa kebijakan “*War on Terrorism*” dan praktek-praktek yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian feminis dimana tidak mempertimbangkan gender atau bias gender dan hingga akhirnya hubungan internasional telah mengalami kerugian karena adanya kebijakan Amerika Serikat dalam “*War on Terrorism*” yang mengabaikan pespektif feminis tersebut. Instrumen dan aparat negara pada masa pemerintahan George Walker Bush selama dua periode tersebut dalam kebijakan “*War on Terrorism*” telah menciptakan dilema keamanan sendiri dalam rangka mencapai keuntungan bagi keamanan negara. Akhirnya, dari hasil analisis tersebut teori keamanan feminis atau *feminist security theory* menyatakan bahwa “keamanan” yang diusung oleh teori realis yang maskulin perlu didefinisikan kembali, bahwa sesungguhnya peran perempuan sangat penting untuk menciptakan suatu kebijakan yang tidak menyebabkan dunia internasional menjadi konfliktual, dan maka dari itu *feminist security theory* tidak hanya untuk mengkritik dan

menganalisis, tetapi juga untuk merenungkan potensi untuk adanya suatu perubahan.

## **V.2 Saran**

Dalam penelitian ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis memberi saran kepada peneliti-peneliti selanjutnya mengenai kritik melalui agenda *feminist security theory* atas kebijakan *war on terrorism* dalam pemerintahan Amerika Serikat saat ini dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut terutama kepada kaum perempuan hingga saat ini.